

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

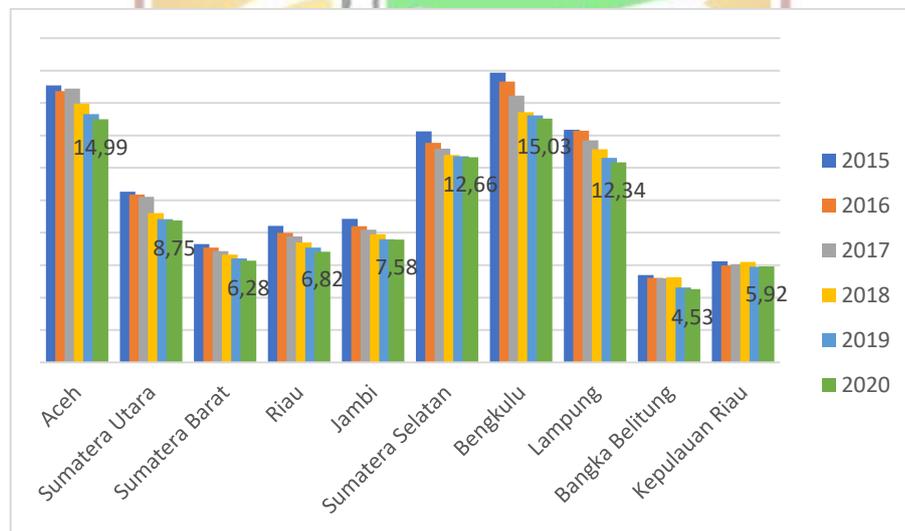
Suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat disebut dengan pembangunan. Untuk mengetahui keberhasilannya, dapat diukur salah satunya melalui persoalan kemiskinan. Permasalahan ini bersifat multidimensi dan sangatlah kompleks. Permasalahan ini tidak hanya ditinjau dari sisi moneter melainkan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, dan lain-lain. Selain itu, kemiskinan adalah persoalan yang dinamis karena individu atau rumah tangga dapat keluar atau masuk dari kemiskinan. Saat tingkat pengeluaran rata-rata untuk seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan lebih rendah dari garis kemiskinan maka penduduk itu tergolong miskin (BPS, 2023).

Kemiskinan sedari dahulu merupakan tantangan bagi setiap negara dan hingga kini tetap menjadi isu penting pembangunan. Hal ini tercermin dalam penetapan tujuan utama pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium sebelumnya (MDGs), yaitu menghapus segala bentuk kemiskinan sehingga pada tahun 2030 tercapai kondisi tanpa kemiskinan (United Nations, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara yang masih terus berupaya memberantas kemiskinan. Hal ini tertuang dalam tujuan pembangunan yang tercermin pada RPJMN yang telah mengarusutamakan SDGs dengan mencakup lima poin penting salah satunya yaitu pembangunan SDM melalui pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan laporan ADB (2021), Indonesia menempati urutan keenam sebagai negara termiskin di kawasan ASEAN. BPS (2023) mencatat bahwa pada tahun 2020 masih terdapat sebanyak 26.420.000 atau 9,8 persen orang yang tidak sejahtera di Indonesia. Angka kemiskinan naik 0,37 persen dari tahun 2019 yang dilaporkan sebesar 9,4 persen, seiring dengan kenaikan garis kemiskinan. Batas kemiskinan di perkotaan meningkat 6,73 persen sementara di perdesaan lebih tinggi yaitu 7,14 persen. Angka kemiskinan yang meningkat salah satunya dipicu oleh pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita yang lebih rendah daripada garis

kemiskinan, melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, naiknya harga beberapa komoditas pokok serta hadirnya pandemi Covid-19.

Kemiskinan tersebar secara tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Kalimantan. Jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera dilaporkan sebanyak 5,8 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 9,87 persen. Daerah penyumbang kemiskinan tertinggi yaitu Provinsi Bengkulu dan Aceh. Padahal Aceh terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, Aceh berturut-turut menjadi daerah termiskin di Sumatera dengan kemiskinan rata-rata mencapai 16,06 persen. Kemudian pada tahun 2020 posisinya bergeser menjadi peringkat kedua dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 14,99 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kemiskinan nasional dan belum sesuai dengan target RPJM tahun 2017-2022 sebesar 13,43 persen sehingga kemiskinan masih menjadi isu strategis yang harus segera diatasi (Bappeda Provinsi Aceh, 2019).



Sumber: BPS (2020)

Gambar 1.1 Kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 (%)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di berbagai provinsi sepanjang periode tersebut cenderung berkurang. Namun masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional. Pada urutan pertama terdapat Provinsi Bengkulu, diikuti oleh Aceh, Sumatera Selatan,

dan Lampung. Sementara itu, kemiskinan terendah terdapat di Bangka Belitung yang kurang dari 5 persen. Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat kemiskinan lebih tinggi di perdesaan dengan daerah termiskin yaitu Provinsi Aceh sejak tahun 2015 hingga 2020.

Kondisi tersebut sejalan dengan laporan Bappenas (2020) bahwa isu utama dalam pembangunan kewilayahan di Indonesia adalah kemiskinan perdesaan yang tinggi dan hampir dua kali lipat daripada perkotaan. Voss et al. (2008) mengungkapkan faktor geografis serta pembangunan yang terkonsentrasi di perkotaan merupakan salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Daulay (2009) menyatakan masalah ini disebabkan karena kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang belum optimal bagi penduduk perdesaan akibat kurang memperhatikan dimensi tata ruang wilayah yang memiliki perbedaan karakteristik sumber daya. Sen (2013) dalam Idrus & Rosida (2020) menambahkan bahwa sektor pekerjaan yang utama di perdesaan adalah pertanian, sementara angka kemiskinan di sektor ini selalu paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Sekitar 70 persen dari 5 juta jiwa penduduk Aceh tinggal di perdesaan dan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Menurut laporan BPS Provinsi Aceh (2020), serapan tenaga kerja sektor pertanian naik menjadi 37,22 persen dari tahun sebelumnya. Disamping itu PDRB sektor pertanian meningkat dari tahun lalu menjadi 30,98 persen.

Tabel 1.1 Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2015-2020 (%)

Periode	Persentase Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahan Kemiskinan	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
Maret 2015	11,13	19,44	2,24	3,44	0,66	0,9
Maret 2016	10,82	19,15	2,3	3,96	0,7	1,12
Maret 2017	11,11	19,37	1,55	3,59	0,35	1,0
Maret 2018	10,44	18,49	1,58	3,42	0,37	0,93
Maret 2019	9,68	18,03	1,59	3,15	0,38	0,8
Maret 2020	9,84	17,46	1,55	3,28	0,35	0,88

Sumber: BPS (2020)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2020 daerah perdesaan selalu lebih miskin dibandingkan perkotaan, baik dari segi persentase, keparahan, dan kedalaman kemiskinan. Rata-rata tingkat kemiskinan sepanjang periode pengamatan di atas mencapai 16,16 persen dengan rata-rata kemiskinan perdesaan mencapai 18,65 persen. Kemiskinan perdesaan tertinggi tercatat pada tahun 2015 dan terendah tercatat pada Maret 2020. Meskipun persentase penduduk miskin perdesaan pada tahun 2020 berkurang 0,57 persen dari tahun sebelumnya, akan tetapi indeks kedalaman dan keparahannya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan serius mengenai keadaan kemiskinan di Provinsi Aceh, khususnya daerah perdesaan sehingga penting untuk menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dibutuhkan informasi yang detail mengenai kemiskinan tersebut, seperti siapa yang tergolong kelompok miskin itu dan bagaimana karakteristiknya. Haughton & Khandker (2009) menjelaskan bahwa karakteristik rumah tangga dan individu menjadi salah satu di antara faktor yang berkorelasi dengan kemiskinan. Karakteristik tersebut adalah sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga. Ukuran rumah tangga, struktur umur, rasio ketergantungan, dan jenis kelamin kepala rumah tangga termasuk kategori demografi. Status pekerjaan, jam kerja, dan aset yang dimiliki merupakan karakteristik ekonomi. Sementara itu karakteristik sosial dapat berupa status kesehatan dan gizi, pendidikan, dan tempat tinggal.

Jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor demografi yang berkorelasi dengan kemiskinan. Jumlah ART mencerminkan banyaknya orang yang tinggal di suatu rumah tangga. Pada umumnya, rumah tangga miskin memiliki jumlah anggota yang lebih banyak daripada rumah tangga tidak miskin. Semakin banyak anggota rumah tangga, semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena untuk memenuhi konsumsi rumah tangga berarti dibutuhkan biaya yang lebih tinggi. Menurut Libois & Somville (2017) jika jumlah orang di rumah meningkat namun mereka tidak berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, akan menyebabkan penurunan konsumsi per kapita. Rata-rata rumah tangga di Provinsi Aceh memiliki jumlah anggota 4 orang.

Karakteristik kepala rumah tangga (KRT) turut berkorelasi dengan kemiskinan. Rumah tangga miskin didominasi oleh KRT perempuan. Mereka menjadi kepala keluarga dikarenakan bercerai, suami meninggal dunia atau merantau. Idrus & Rosida (2020) menjelaskan bahwa isu perempuan di negara berkembang harus menjadi perhatian karena berkontribusi terhadap kemiskinan. Ketidaksetaraan yang dialami perempuan seperti tidak memperoleh manfaat sepenuhnya dari berbagai program dan kebijakan pemerintah menyebabkan perempuan cenderung lebih rentan miskin daripada laki-laki. Perempuan memiliki beban ganda untuk mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Disamping itu, perempuan umumnya masih memiliki keterbatasan dalam pasar tenaga kerja (Todaro & Smith, 2011). Jumlah KRT perempuan di Provinsi Aceh lebih sedikit daripada laki-laki dengan jumlah tanggungan paling banyak antara 2 hingga 5 orang. Berdasarkan tempat tinggal, KRT perempuan lebih banyak menetap di perdesaan dan terus bertambah dari tahun 2015 menjadi 22,46 persen (BPS, 2022).

Selanjutnya status perkawinan KRT berkaitan dengan status kemiskinan. Status perkawinan menunjukkan apakah seseorang menikah, bercerai, ataupun belum menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Neway & Massresha (2022) menyatakan ketika seseorang menikah, jumlah beban tanggungannya akan bertambah sehingga menyebabkan ia lebih rentan menjadi miskin. Saat menikah, biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan makanan dan pokok lainnya akan semakin besar. Saat pendapatan KRT terbatas, hal ini dapat menjadi ancaman untuk jatuh miskin. Rumah tangga di Aceh didominasi oleh penduduk berstatus kawin. Sebanyak 58,98 persen penduduk usia 10 tahun ke atas berstatus kawin, 32,31 persen nya belum kawin, cerai hidup 2,1 persen dan cerai mati sebanyak 6,61 persen (BPS, 2020).

Umur KRT juga merupakan faktor yang mempengaruhi status kemiskinan. Umur berkaitan dengan produktivitas seseorang. Saat seseorang berada pada umur muda, umumnya pengalaman dan keterampilan kerja yang dimiliki masih terbatas sehingga peluang dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik juga terbatas. Sementara pada umur tua, pengalaman dan keterampilan umumnya lebih baik dan pekerjaan lebih stabil. Pertambahan umur akan mengurangi resiko menjadi miskin (Azali & Harsanti, 2022). Struktur demografi penduduk di Provinsi Aceh

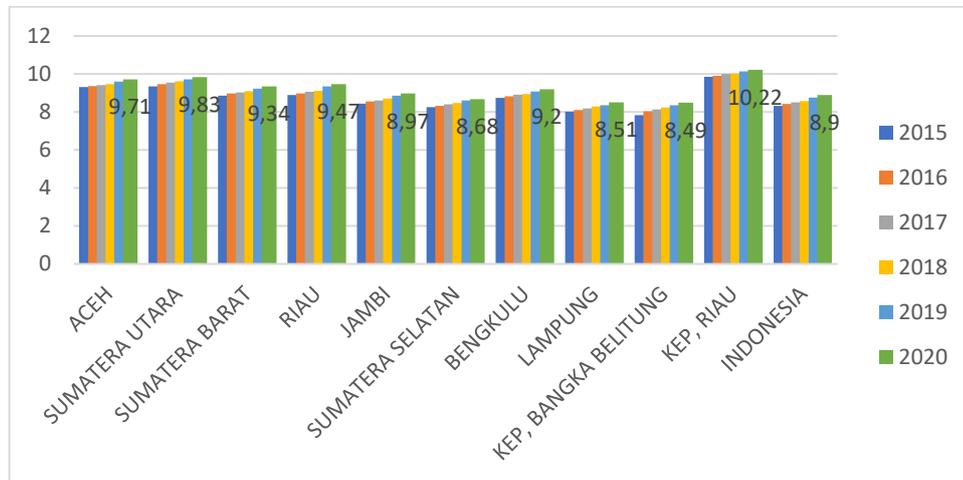
didominasi oleh penduduk usia produktif. Jumlah KRT yang berada dalam rentang usia produktif mencapai 1.060.402 orang (BKKBN, 2021).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah kepemilikan aset berupa bangunan tempat tinggal. Status kepemilikan bangunan milik sendiri akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sewa perumahan. Dengan demikian, peluang untuk menjadi miskin akan berkurang (Kharisma & Santoso, 2021). Jumlah rumah tangga yang memiliki bangunan tempat tinggal sendiri di perdesaan Aceh mencapai 86,81 persen, lebih banyak dibandingkan perkotaan yang tercatat sebanyak 68,75 persen (BPS, 2020).

Akses terhadap lembaga keuangan seperti tabungan dan kredit memiliki keterkaitan dengan kemiskinan perdesaan. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap kredit berpeluang lebih kecil untuk miskin (Woldie et al., 2020). Sementara itu, rumah tangga yang tidak memiliki tabungan memiliki kerentanan yang tinggi menjadi miskin. Kondisi tersebut dapat terjadi karena ketidakmampuan rumah tangga dalam menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi seperti naiknya harga ataupun bencana alam (Adnyani & Sugiharti, 2019). Adapun rata-rata jumlah kredit dan tabungan di Provinsi Aceh telah meningkat sejak tahun 2015. Adapun rata-rata realisasi kredit menurut laporan Bank Indonesia (2020) pada tahun 2020 naik Rp 11 triliun, sementara kenaikan rata-rata jumlah tabungan mencapai Rp 7,8 triliun. Berdasarkan tempat tinggal, penduduk perkotaan memiliki akses kredit yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan masing-masingnya 17,2 persen dan 13,06 persen (BPS, 2020). Perkembangan kredit dan tabungan yang semakin tinggi menandakan semakin baiknya akses layanan keuangan di Provinsi Aceh.

Kemiskinan telah dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk pendidikan. Pendidikan diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan. Di Indonesia, pendidikan formal dimulai dari jenjang dasar, menengah, dan atas. Sharp et al. dalam Kuncoro (2010) menyatakan bahwa apabila pendidikan rendah, maka produktivitas akan menjadi rendah. Angka rata-rata lama sekolah menjadi salah satu cerminan dari capaian pendidikan di Indonesia. Mengacu pada BPS (2021), rata-rata tahun yang ditempuh untuk semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani

pada usia 15 tahun dan lebih adalah rata-rata lama sekolah. Angka ini terus meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.



Sumber: BPS (2020)

Gambar 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2020 (Tahun)

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa penduduk Aceh telah mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat 3 SMP/Sederajat yang ditunjukkan oleh capaian RLS 9,7 tahun. Kondisi ini lebih baik dibandingkan capaian nasional yang penduduknya baru menamatkan pendidikan pada tingkat 2 SMP. Selain itu, jika dibandingkan dengan capaian RLS provinsi di Sumatera, Aceh menjadi daerah dengan pendidikan tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara selama periode 2015-2020. Sedangkan menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan menengah di perdesaan mencapai 21,5 persen tingkat SMP dan 32,69 persen tingkat SMA (BPS, 2020). Capaian pendidikan yang baik ini mendorong kenaikan IPM sehingga angka IPM Aceh menempati urutan ke-4 tertinggi di Sumatera. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SDM di Provinsi Aceh berkualitas yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa peneliti telah menganalisis karakteristik kemiskinan rumah tangga di berbagai wilayah, namun hasil kajian empiris menunjukkan temuan yang berbeda. Jumlah ART dan jenis kelamin KRT positif signifikan mempengaruhi kemiskinan, sedangkan umur berpengaruh negatif (Rini & Sugiharti, 2016; Kharisma & Santoso, 2021; Suryadi, 2022). Akan tetapi, peneliti lain menemukan

jenis kelamin KRT ternyata tidak berpengaruh signifikan (Nopriansyah et al., 2015; Direja, 2021). Beberapa peneliti juga menemukan umur KRT tidak berpengaruh signifikan (Woldie et al., 2020; Mekore & Yaekob, 2018). Haryanto et al. (2020) mendapatkan kemiskinan dan akses kredit berhubungan negatif, bertentangan dengan Neway & Massresha (2022) yang menemukan kredit berpengaruh positif. Woldie et al. (2020) membuktikan pendidikan dan kemiskinan berhubungan negatif namun Rosmika (2021) menunjukkan pendidikan tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa perkembangan karakteristik kemiskinan rumah tangga sebagian besar berada dalam kondisi yang cukup baik. Akan tetapi, perdesaan Aceh masih menyandang status sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatera. Kemudian juga ditemukan *research gap* antara hasil penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga di Perdesaan Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kemiskinan rumah tangga di perdesaan Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi terhadap kemiskinan rumah tangga di perdesaan Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran umum kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi terhadap kemiskinan rumah tangga di perdesaan Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

- A. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi serta berkontribusi bagi ilmu pengetahuan.

B. Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk peneliti berikutnya dengan topik kajian yang sama.
3. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Kajian ini menganalisis karakteristik kemiskinan rumah tangga di perdesaan Provinsi Aceh. Analisis dibatasi pada variabel jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin KRT, status perkawinan KRT, umur KRT, pendidikan KRT, lapangan usaha KRT, status kepemilikan tabungan, status kepemilikan bangunan tempat tinggal, dan akses kredit usaha berdasarkan data Susenas Maret 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan uraian dan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini memaparkan berbagai konsep serta teori yang menjadi landasan kajian serta kajian terdahulu yang relevan sehingga menghasilkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat uraian mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan serta sumbernya, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan empiris dari hasil pengolahan data menggunakan regresi logistik untuk mengungkap kebenaran hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan hasil kajian serta saran terhadap pihak terkait sesuai tujuan penelitian.

